

PENGEMBANGAN INTELLECTUAL CAPITAL DAN SOCIAL CAPITAL MELALUI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

Suyato
FISE Universitas Negeri Yogyakarta

Abstract

Developing intellectual and social capital in preparing student for their future's role as constructive and critical citizen is essential in a healthy democratic state. School-based civic education as one of means in building such ones faces some challenges. Developing intellectual and capital, may be, is the greatest one. This paper tries to propose the urgency of such effort by arguing that school-based civic education can be utilized as a means of making well informed citizen. The main concepts, such as democracy, citizenship, and responsibilities of government should be understood by citizen properly and comprehensively. Therefore, the paramount challenge of civic education teachers is how to implement a teaching strategy for best instilling those values, because people are not born with the knowledge, skills, and attitudes necessary to make democracy work; rather, they acquire this knowledge and capacity for democratic citizenship only through experience, especially through school-based civic education. One of the best strategies of civic education is portfolio-based teaching strategy. In this activity, students have an opportunity to practicing their values related to democracy, citizen, and responsibility of government. Besides its disadvantages, portfolio-based teaching strategy is a promising one in order to prepare the well informed citizen very needed in a healthy democratic state. Accordingly, teachers of civic education should change their circumstances by implementing this strategy.

Keywords: pengembangan, intellectual capital, social capital, PKn

A. Pendahuluan

Toleransi antarwarganegara dan kepercayaan rakyat terhadap sistem politik, khususnya dengan para wakilnya dan pejabat publik tidak akan tercipta tanpa adanya rasa saling percaya (*mutual trust*). *Trust* ini nampaknya mulai memudar dalam masyarakat Indonesia dengan indikasi, misalnya banyaknya konflik sosial, baik yang bersifat vertikal maupun horisontal. Konflik horisontal memang potensial terjadi mengingat ciri masyarakat kita yang majemuk, baik dari segi agama, etnik, ras, budaya, status sosial ekonomi, maupun

orientasi politik dan ideologi. Konflik yang bersifat vertikal, misalnya dalam bidang politik dan hukum, beberapa kasus yang menonjol misalnya tingkat kepercayaan rakyat yang rendah terhadap wakilnya, polisi, hakim, jaksa, dan aparat penegak hukum lainnya. Kondisi semacam ini bila terus dibiarkan bisa membuat demokrasi tidak bisa berjalan, *democracy did not work*, meminjam istilah Putnam (1993).

Dalam sebuah negara demokrasi yang sehat, keberadaan warga negarawarga negara yang memiliki pemahaman yang memadai tentang konsep

konsep yang berkaitan dengan demokrasi, kewarganegaraan, dan pemerintahan yang bertanggung jawab merupakan salah satu elemen penting. Pendidikan kewarganegaraan sebagai pendidikan politik persekolahan memiliki peran yang strategis untuk mewujudkan hal tersebut. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan Patrick (1999:33) yang menyatakan bahwa ada empat komponen kajian *Civic Education* (PKn), yaitu (1) pengetahuan kewarganegaraan dan pemerintahan demokratis; (2) kecakapan kognitif dari kewarganegaraan demokratis; (3) kecakapan berpartisipasi sebagai warga negara yang demokratis, dan (4) keutamaan karakter kewarganegaraan yang demokratis.

Dengan kata lain, warga negara yang memiliki *intellectual capital* dan *social capital* merupakan prasyarat bagi terciptanya negara dan masyarakat demokratis yang sehat. Namun demikian, keberadaan warga negara dengan kualifikasi dimaksud masih langka. Oleh karena itu, adalah tantangan Pendidikan Kewarganegaraan untuk mewujudkannya.

Melihat begitu pentingnya *intellectual capital* demi berjalannya praktik demokrasi, adalah sangat menyedihkan kalau masih banyak warga negara Indonesia yang belum memilikinya. Dapatkah Pendidikan Kewarganegaraan (*civic education*) di sekolah menjadi sarana yang efektif untuk mengembangkan *intellectual capital* yang sangat dibutuhkan dalam rangka berpartisipasi secara aktif, positif, dan efektif. Dapat, kata beberapa ilmuwan politik dan pakar pendidikan terkemuka seperti Caesar & McGuinn,; Hirsch, Jr., Niemi & Junn (Patrick, 1999: 46). Yang menjadi pertanyaan, strategi pembelajaran seperti apa yang mampu mengembangkan *intellectual capital* dan *social capital*?

Apakah strategi pembelajaran berbasis portofolio dalam PKn mampu mengembangkan *intellectual capital* dan *social capital*?

B. Pembahasan

1. *Intellectual Capital* dan *Social Capital*

a. *Intellectual Capital*

Intellectual Capital terdiri atas pengetahuan dan keterampilan yang memungkinkan seseorang untuk memahami dunia dan dengan itu ia bisa bertindak rasional dan efektif. Jenis *intellectual capital* yang diperlukan bagi warga negara yang bertanggung jawab adalah pengetahuan tentang prinsip-prinsip dan praktik demokrasi serta kapasitas pengetahuan untuk menerapkan pengetahuan ini pada masalah-masalah publik (Hirsch, Jr, 1996: 17-47). Beberapa konsep penting yang harus dipahami sebagai warga negara yang demokratis adalah pemerintahan, kedaulatan rakyat, partisipasi politik, konstitusionalisme, hak-hak asasi manusia, kewarganegaraan yang bertanggung jawab, *civil society*, dan ekonomi pasar.

Warga negara yang memiliki *intellectual capital* semacam itu akan memiliki kemampuan untuk berpartisipasi dalam bidang politik dan kemasyarakatan, atau meminjam istilah Nie, Junn, & Stehlik-Barry (Patrick, 1999: 45) sebagai warga negara yang tercerahkan dalam berpartisipasi (*enlightened political engagement*). Konsep *intellectual capital* sangat erat kaitannya dengan konsep-konsep yang merupakan atribut warga negara yang baik, seperti toleransi politik, kepentingan politik, dan pengetahuan tentang pemberdayaan politik. Singkatnya, sebagaimana dikatakan Delli Carpini dan Scott Keeter "For citizens who are the most informed, democracy works much as intended, while

for those who are the most uninformed, democracy is a tragedy or a farce" (1996: 60). Lebih lanjut mereka mengatakan "...democracy functions best when its citizen are politically informed" (1996:1).

b. Social Capital

Social capital, sebagaimana modal-modal lainnya, merupakan alat atau sarana untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Menurut Ladd, sebagaimana dikutip Patrick (1999: 50) konsep *social capital* mencakup "any form of citizens' civic engagement employed or capable of being to address community needs and problems and, in general, to enhance community life". *Social capital* terdiri dari keterampilan partisipatori atau berpartisipasi (*participatory skills*), kebajikan kewarganegaraan (*civic virtues*), dan karakter (*dispositions*) yang memungkinkan para individu atau kelompok untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu (Newton, sebagaimana dikutip Patrick (1999: 50). Karakter dan kebajikan kewarganegaraan menunjuk pada sifat-sifat karakter seperti kedaban, sosialibilitas, kejujuran, kontrol diri, toleransi, kepercayaan, pengorbanan, loyalitas, dorongan, rasa hormat terhadap harga diri dan martabat setiap orang dan peduli terhadap kepentingan umum (Schmitter, dalam Patrick, 1999: 51).

Putnam, seorang ahli ilmu politik, menjelaskan bagaimana keterampilan partisipatif dan kebijakan atau karakter kewarganegaraan menjadi modal sosial. Katanya „By analogy with notions of physical capital and human capital—tools and training that enhance individual productivity—social capital refers to features of social organization such as networks, norm, and social trust that facilitate coordination and cooperation for mutual benefit" (Putnam, 1995: 67). Lebih lanjut, lewat penelitian yang ia lakukan cukup lama,

ia menyimpulkan bahwa partisipasi warga negara melalui jaringan organisasi sukarela berbasis komunitas, adalah cara untuk membangun modal sosial dan bersama-sama dengan *intellectual capital* membuat demokrasi bekerja (Putnam, 1993: 181-185).

Bullen and Onyx menyatakan ada 8 elemen modal sosial, yaitu (1) partisipasi di dalam komunitas lokal; (2) proaktif di dalam konteks social; (3) perasaan aman dan saling percaya; (4) hubungan ketetanggaan; (5) hubungan persahabatan dan keluarga; (6) toleransi terhadap perbedaan; (7) nilai-nilai hidup; dan (8) hubungan kerja (www.mapl.com.au/A2.htm).

Kepercayaan (*trust*) di antara warga negara sebagai salah satu elemen penting dalam *social capital*. Warga negara yang saling percaya dapat bekerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Sebaliknya, orang-orang yang sinis, terasingkan, dan individualistis akan cenderung untuk berada di luar masyarakat sipil di dalam bidang yang termarginalkan (Fukuyama, 1995; Putnam, 1993; Seligman, 1997).

2. Aspek Intellectual Capital dan Social Capital dalam PKn

Niemi dan Junn telah mendokumentasikan potensi dari Pendidikan Kewarganegaraan di sekolah untuk mengembangkan *intellectual capital* di antara para siswa, sesuatu yang sangat diperlukan untuk berpartisipasi secara konstruktif dalam kehidupan politik. Pendidikan Kewarganegaraan yang efektif mencakup proses belajar mengajar yang sistematis tentang ide-ide kunci atau substansi demokrasi melalui kurikulum di sekolah. Ketika siswa menjadi matang, mereka siap memasuki dunia mereka, baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa,

dan bernegara karena mereka telah memiliki pemahaman yang memadai. Lebih lanjut, pendidikan kewarganegaraan yang efektif mencakup aplikasi dari konsep-konsep inti untuk menganalisis dan menilai isu-isu publik dan masalah-masalah demokrasi. Ia juga mencakup usaha untuk memberi kesempatan kepada para siswa untuk berdiskusi dan berinteraksi dengan siswa lain ketika mereka membahas isu-isu dan masalah-masalah pemerintahan dan kewarganegaraan yang demokratis. Pembahasan yang sistematis tentang ide-ide kunci dan praktik secara sistematis di dalam menerapkannya ke dalam organisasi serta interpretasi dan informasi adalah hal yang membuat para siswa belajar tentang apa yang menjadi syarat dari partisipasi warga negara yang konstruktif (Niemi & Junn, 1998: 117-146).

Senada dengan itu, Hirsch, Jr. (1996) menyatakan bahwa pengembangan *intellectual capital* melalui kurikulum persekolahan mencakup perpaduan proses kognitif dan inti-inti materi mata pelajaran dan keterampilan berpikir yang diharapkan dipelajari para siswa. Oleh karena itu, beberapa ide, informasi, dan isu seyogyanya dipandang oleh para guru dan siswa sebagai lebih penting dan oleh karena itu lebih ditekankan daripada materi yang lainnya. Para siswa seharusnya diajari bahwa pengetahuan tidak sama nilainya untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik. Sebagai contoh, konsep-konsep tentang substansi demokrasi yang merupakan inti dari pendidikan untuk warga negara yang demokratis, adalah prasyarat bagi pengembangan dan pemeliharaan bagi komunitas yang aktif dan bertanggung jawab. Tanpa pengetahuan umum ini, yang seharusnya dikembangkan melalui pengalaman belajar di sekolah, warga negara

tidak akan mampu untuk bertindak bersama-sama menganalisis isu-isu dan masalah-masalah kebijakan publik, membuat keputusan yang benar, atau berpartisipasi secara cerdas untuk menyelesaikannya.

Pertanyaan selanjutnya, apa isi atau konsep-konsep tentang substansi demokrasi yang merupakan inti dari pendidikan bagi kewarganegaraan yang efektif? Berikut ini adalah contoh konsep-konsep substansi demokrasi yang merupakan inti dari pendidikan untuk kewarganegaraan yang demokratis yang dikemukakan Patrick, (1999: 3).

1. Demokrasi Minimal (*minimal democracy*), yang meliputi:
 - a. Kedaulatan Rakyat (Pemerintahan berdasarkan kesepakatan yang diperintah).
 - b. Representasi dan akuntabilitas di dalam pemerintahan.
 - c. Pemilihan wakil dalam pemerintahan yang kompetitif, adil, dan bebas.
 - d. Kemampuan secara komprehensif untuk berpartisipasi sebagai pemilih yang bebas di dalam pemilu.
 - e. Akses yang bersifat inklusif untuk berpartisipasi secara bebas untuk mengusahakan kepentingan umum atau pribadi.
 - f. Aturan mayoritas rakyat untuk hajat hidup orang banyak
2. Konstitusionalisme (*constitutionalism*)
 - a. Pemerintahan, ekonomi, dan masyarakat berdasarkan hukum.
 - b. Kekuasaan pemerintah yang terbatas dan diberdayakan untuk menjamin hak-hak rakyat.
 - c. Distribusi, pemisahan, dan berbagi kekuasaan di dalam pemerintahan.

- d. Peradilan yang bebas dengan kekuasaan untuk menguji konstitusi atau pengadilan.
3. Hak-hak (*rights*)
 - a. HAM atau Hak-hak konstitusional.
 - b. Hak-hak politik dan hak-hak pribadi atau privat.
 - c. Hak-hak lingkungan, budaya, sosial, dan ekonomi.
 - d. Hak-hak negative dan hak-hak positif.
4. Kewarganegaraan (*citizenship*)
 - a. Keanggotaan rakyat berdasarkan kualifikasi legal tentang kewarganegaraan.
 - b. Hak-hak, peran, dan tanggung jawab warga Negara.
 - c. Identitas warga dan tipe-tipe identitas lainnya (misalnya etnis, ras, agama)
 - d. Hak-hak warga Negara secara individual dan hak-hak warga negara secara kelompok.
5. Masyarakat Madani (*civil society/free and open social system*)
 - a. Keanggotaan secara sukarela dalam organisasi nonpemerintah
 - b. Kebebasan berserikat, berkumpul, dan pilihan social.
 - c. Keanggotaan/identitas kelompok yang bersifat pluralisme/ganda.
 - d. Regulasi sosial (aturan hukum, kebiasaan, tradisi, dan kebajikan).
6. Ekonomi Pasar (*market economy/free and open economic system*)
 - a. Kebebasan bertukar dan pilihan ekonomi
 - b. Regulasi ekonomi (aturan hukum, kebiasaan, tradisi, dan kebijakan)
7. Ketegangan yang selalu berproses di dalam demokrasi liberal konstitusional
 - a. Aturan mayoritas dan hak-hak minoritas (batas-batas mayoritas dan minoritas-minoritas atau individu-individu).
 - b. Kebebasan dan kesetaraan (kombinasi hak-hak positif dan hak-hak negatif untuk memperoleh keadilan).
 - c. Kebebasan dan tatanan (batas-batas kekuasaan dan kebebasan untuk mencapai jaminan hak-hak).
 - d. Kepentingan individu dan kepentingan umum (ruang dan batas-batas pilihan pribadi).

Penguasaan, pengulangan, dan penggunaan yang efektif *intellectual capital* diperoleh dari proses belajar mengajar tentang konsep-konsep inti dan keterampilan kognitif berdasarkan disiplin ilmu atau disiplin akademik. Menurut Cromer "*The effective curriculum is concept driven. [And] all concepts are linked to experience through appropriate activities*". This kind of education "provides a consistent, coherent, and universal framework of basic knowledge on which individuals can build their own understanding of the world" (1997: 183).

Pembelajaran berbasis isu atau masalah memang kurang tepat untuk mengembangkan *intellectual capital* ini, tetapi bukan berarti pendekatan ini tidak boleh digunakan oleh para guru PKn. Pendekatan ini bisa digunakan bersama-sama dengan pendekatan berbasis disiplin ilmu, karena dengan memadukan kedua pendekatan itu, sebagaimana telah dipraktikkan oleh *center for civic education* dengan *Project Citizen*. Di Indonesia, pembelajar ini lebih dikenal sebagai Pembelajaran Berbasis Portofolio.

Mengingat begitu strategisnya peranan *social capital* dalam pelaksanaan

demokrasi, adalah perlu bagi PKn untuk menempatkan pengembangan *social capital* di antara para siswa sebagai agenda utamanya. Pertanyaan selanjutnya, apa yang seharusnya dilakukan sekolah. Khususnya para guru PKn untuk membangun *social capital*? Pengembangan *social capital* dapat dilakukan melalui kurikulum sekolah yang menyertakan pengalaman di luar sekolah. Partisipasi aktif secara teratur melalui pendekatan *school-based service learning* atau proses pembelajaran berbasis portofolio yang dikembangkan *Center for Civic Education (CCE)* merupakan dua contoh aplikasi dalam rangka mengembangkan *intellectual and social capital* bagi siswa. Berikut ini akan dikemukakan contoh pembelajaran PKn berbasis portofolio sebagai sarana untuk mengembangkan kedua modal itu.

3. Penerapan Pembelajaran Portafolio PKn untuk Pengembangan *Intellectual Capital* dan *Social Capital*

Konsep strategi pembelajaran (*instructional strategy*) menurut Dick and Carey (1978:106) menggambarkan komponen-komponen umum dari seperangkat bahan ajar dan prosedur yang akan digunakan untuk menumbuhkan hasil belajar tertentu dari siswa. Secara lengkap dikatakan bahwa "*an instructional strategy describes the general components of a set of instructional materials and procedures that will be used with those materials to elicit particular learning outcomes from student*". Lebih lanjut, dikatakan bahwa ada lima komponen utama di dalam strategi pembelajaran, yaitu (1) kegiatan prapembelajaran (*preinstructional activities*); (2) penyajian informasi (*information presentation*); (3) partisipasi siswa (*student participation*); (4) ujian (*testing*); dan (5) tindak lanjut (*follow through activities*) (Dick and Carey, 1978:110).

Portofolio sebenarnya dapat diartikan sebagai suatu wujud benda fisik, sebagai suatu proses sosial pedagogis, maupun sebagai *adjective* (Dasim Budimansyah, 2002:1-2). Sebagai suatu benda fisik, portofolio itu adalah bundel, yakni kumpulan atau dokumentasi hasil pekerjaan siswa yang disimpan dalam suatu bundel, misalnya hasil tes awal, tugas, tugas, catatan anekdot, piagam penghargaan, keterangan melaksanakan tugas *terstruktur*, hasil tes akhir, dan sebagainya. Sebagai suatu proses sosial pedagogis, portofolio adalah kumpulan pengalaman belajar (*a collection of learning experiences*) yang terdapat di dalam pikiran peserta didik, baik yang berujud pengetahuan, kecakapan, maupun sikap. Adapun sebagai *adjective*, portofolio seringkali disandingkan dengan konsep lain, misalnya dengan konsep pembelajaran, maka dikenal istilah pembelajaran berbasis portofolio (*portfolio based learning*), sedangkan bila disandingkan dengan konsep penilaian maka dikenal istilah penilaian berbasis portofolio (*portfolio based assessment*).

Portofolio dalam pembelajaran dapat dilihat dari tiga aspek, yaitu sebagai strategi/metode, sebagai media, dan evaluasi. Dari segi strategi/metode, pembelajaran portofolio merupakan penerapan strategi pemecahan masalah. Ditinjau dari segi media, pembelajaran portofolio menyangkut pengembangan dan produksi media pembelajaran. Dari segi evaluasi, pembelajaran portofolio merupakan penerapan teknik evaluasi yang unik (Abdul Gafur, 2003:68). Penjelasan lebih lanjut dari ketiga segi ini dapat dikemukakan dalam uraian berikut.

Ditinjau dari segi strategi/ metode, pembelajaran portofolio merupakan penerapan strategi pemecahan masalah.

Hal ini dapat dilihat dari langkah-langkah pengembangan portofolio yang meliputi: identifikasi masalah, identifikasi alternatif pemecahan masalah, pemilihan alternatif, penentuan rencana tindakan, pengembangan portofolio, penyajian portofolio, dan merefleksikan pengalaman belajar (CCE Indonesia, 2003:12-20).

Dari segi media, pembelajaran portofolio menyangkut pengembangan dan produksi media. Hal ini dapat dilihat dari definisi dan spesifikasi portofolio. Portofolio adalah sebuah kumpulan pekerjaan siswa yang bermanfaat, terintegrasi, yang diseleksi menurut panduan yang telah ditetapkan. Panduan tersebut sangat beragam, tergantung disiplin ilmu dan tujuan penilaian portofolio.

Relevansi portofolio dalam rangka pengembangan *intellectual capital* dan *social capital* dapat dilihat dari teori yang mendasari model pembelajaran ini. Teori yang mendasari model pembelajaran berbasis portofolio, antara lain (1) Teori Konstruktivisme; (2) *Democratic Teaching*; (3) Prinsip Pembelajaran Partisipatif; dan (4) Prinsip Belajar Kooperatif.

Menurut Pannen (2001:20), kegiatan pembelajaran yang mendasarkan pada teori konstruktivisme menitikberatkan pada aktivitas siswa untuk menemukan dan membangun sendiri pengetahuannya. Sedangkan menurut Arnie Fajar (2002:45), prinsip umum yang dikembangkan oleh teori konstruktivisme dalam pembelajaran adalah siswa memperoleh kesempatan untuk mendapatkan pengetahuan di luar kelas. Prinsip-prinsip teori belajar konstruktivisme menurut Paul Suparno (1996: 73) meliputi: (1) pengetahuan dibangun oleh siswa secara aktif; (2) tekanan dalam proses belajar lebih pada proses dari-

pada hasil akhir; dan (3) kurikulum menekankan pada partisipasi siswa sedang guru adalah sebagai fasilitator.

Konsep semacam ini jelas terlihat dalam pembelajaran portofolio, antara lain dalam aktivitas para siswa untuk menemukan sendiri konsep dan aplikasinya dalam pemilihan masalah sampai pemecahannya. Dengan melakukan berbagai kegiatan, siswa menemukan dan membangun pengetahuannya sesuai dengan masalah atau tema yang dijadikan kajian portofolio kelompok. Dalam kegiatan semacam ini, *intellectual capital* siswa menjadi berkembang

Democratic Teaching adalah suatu upaya menjadikan sekolah sebagai pusat kehidupan demokrasi melalui proses pembelajaran yang demokratis (Depdiknas, 2004:11). Dengan demikian, pembelajaran yang demokratis adalah pembelajaran yang dilandasi dan mengembangkan nilai-nilai demokrasi, yaitu penghargaan terhadap kemampuan, menjunjung keadilan, menerapkan persamaan kesempatan, dan memperhatikan keragaman peserta didik. Ciri-ciri *Democratic Teaching* semacam ini juga mendasari pembelajaran portofolio, antara lain terlihat pada langkah-langkah pembelajaran portofolio. Aspek ini relevan dengan upaya pengembangan *social capital* siswa.

Melalui proses pembelajaran berbasis portofolio, siswa dididik dan dilatih serta dibiasakan hidup demokratis. Dengan mendasarkan pada penyelesaian masalah (*problem solving*), portofolio sejalan dengan pendapat Zamroni (2001: 44) yang menyatakan bahwa pembelajaran yang demokratis dapat dilaksanakan dengan cara guru membawa *controversial issues* ke dalam kelas untuk didiskusikan dan dikaji siswa. Dengan demikian siswa memiliki ke-

sempatan yang luas untuk menyampaikannya dan mempertahankan pendapat, belajar menghargai pendapat orang lain meskipun berbeda. Penerapan prinsip ini sangat relevan dalam upaya mengembangkan *social capital* siswa.

Model pembelajaran berbasis portofolio juga menganut prinsip pembelajaran partisipatif, sebab melalui model ini siswa belajar sambil mengerjakan (*learning by doing*). Seperti dikatakan Sudjana (2000:155) bahwa pembelajaran partisipatif mengandung arti ikut sertanya peserta didik di dalam program pembelajaran. Keterlibatan siswa dalam model ini sangat jelas, antara lain terlihat pada saat siswa mengidentifikasi masalah untuk dijadikan kajian kelas, penentuan masalah dengan pemungutan suara, aktivitas mencari berbagai sumber dengan berbagai cara, tahap pembuatan panel, dan presentasi, semuanya menuntut siswa aktif berpartisipasi dalam semua kegiatan tersebut. Dalam aktivitas ini, *intellectual capital* dan *social capital* secara simultan dikembangkan oleh guru.

Model pembelajaran portofolio sangat jelas dalam hal menerapkan prinsip belajar kooperatif dan kolaboratif, yaitu pembelajaran yang berbasis kerjasama. Karakteristik belajar kooperatif, sebagaimana dikemukakan Pannen (2001:67; Johnson, 1987:14), yaitu siswa belajar dalam satu kelompok dan memiliki rasa ketergantungan dalam belajar, menyelesaikan tugas kelompok, mengharuskan semua anggota kelompok untuk saling bekerjasama, dan adanya rasa tanggung jawab, juga merupakan karakteristik dari pembelajaran berbasis portofolio. Iklim belajar semacam ini mampu mengembangkan *social capital* pada diri siswa.

Spesifikasi portofolio terdiri dari bagian tayangan dan bagian doku-

mentasi (CCE Indonesia, 2003: 17). Bagian tayangan terdiri dari empat panel papan poster atau papan busa atau yang sejenis, yang berisi tulisan, bagan, atau gambar. Keempat panel tersebut meliputi: (1) panel identifikasi masalah; (2) panel alternatif pemecahan masalah; (3) panel alternatif yang dipilih dalam pemecahan masalah; dan (4) panel rencana tindakan. Bagian dokumentasi berisikan tulisan lengkap maupun bahan visual yang mendukung kelengkapan informasi masing-masing panel dari bagian tayangan, ditambah satu bagian refleksi atau evaluasi diri.

Ditinjau dari segi evaluasi, pembelajaran portofolio merupakan penerapan teknik evaluasi yang unik. Keunikannya ditunjukkan dari penilaian produk bagian tayangan dan dokumentasi. Penilaian teknik presentasi oleh dewan juri pada forum kompetisi (*show case*) dan adanya refleksi diri (*self reflection*). Dalam presentasi, masing-masing kelompok portofolio menyajikan portofolio yang menjadi bagiannya dan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para juri. Prosedur dengar pendapat yang dilakukan dibuat sedemikian rupa sehingga sama dengan langkah-langkah dengar pendapat yang diadakan oleh lembaga-lembaga pemerintahan. Kegiatan ini akan memberikan kesempatan kepada para siswa untuk berpartisipasi dalam proses pemerintahan (CCE Indonesia, 2003: 19). Kriteria penilaian yang digunakan para juri dalam memberikan nilai sudah disediakan oleh CCE, yang secara lengkap dapat dilihat pada lampiran.

Langkah-langkah yang dilakukan dalam proses pembelajaran berbasis portofolio meliputi (1) identifikasi masalah; (2) memilih masalah untuk kajian kelas; (3) mengumpulkan informasi

tentang masalah yang akan dikaji; (4) mengembangkan portofolio kelas; dan (5) menyajikan portofolio.

Pada tahap identifikasi masalah, kegiatan yang dilakukan adalah melakukan inventarisasi permasalahan apa saja yang diketahui dan dirasakan siswa, mulai dari lingkungan keluarga sampai masalah-masalah yang menyangkut hubungan antarbangsa (bersifat global). Untuk melakukan kegiatan ini, seluruh siswa hendaknya mendiskusikan masalah yang berhasil mereka identifikasikan.

Sebagai makhluk individu dan sosial, manusia sebenarnya selalu dihadapkan pada permasalahan hidup sehari-hari. Tentu saja permasalahan yang dapat diangkat nantinya adalah permasalahan yang menyangkut hajat hidup orang banyak dan menyangkut kebijakan publik yang seharusnya dibuat oleh pemerintah. Oleh karena itu, dalam proses identifikasi masalah ini, peran guru adalah mengarahkan agar permasalahan yang diidentifikasi oleh para siswa termasuk dalam lingkup tersebut. Untuk memudahkan dalam langkah ini, kelas dapat dibagi ke dalam kelompok-kelompok kecil. Masing-masing kelompok mendiskusikan satu masalah saja, dilengkapi dengan alasan mengapa dianggap menjadi masalah, seberapa urgen atau mendesak permasalahan itu untuk diatasi, darimana informasi akan diperoleh untuk mengumpulkan data tentang permasalahan tersebut, dan sebagainya.

Berkaitan dengan upaya mencari sumber informasi, ada beberapa cara yang bisa dilakukan oleh para siswa. Pertama, dengan wawancara. Wawancara bisa dilakukan dengan ayah atau ibu di rumah, teman, tetangga, dan orang lain yang dipandang memahami permasalahan tersebut. Kedua, dengan

membaca atau mencari sumber informasi dari buku atau media cetak lainnya. Siswa dapat menemukan masalah dari membaca buku, majalah, tabloid, atau surat kabar yang memuat tulisan, berita atau artikel. Bahan-bahan yang telah terkumpul kemudian dibawa ke kelas untuk didiskusikan dengan teman-teman dengan bimbingan guru. Ketiga, masalah dapat diperoleh dengan melihat media elektronik, televisi atau radio. Siswa dapat mendengarkan siaran berita dari radio atau melihat berita dari televisi berkaitan dengan masalah yang diidentifikasi. Idealnya, siswa menggunakan banyak cara/teknik pengumpulan informasi, tetapi pada prinsipnya, semakin lengkap data yang dikumpulkan, semakin baik.

Setelah menemukan informasi-informasi yang memadai berkaitan dengan masalah yang diidentifikasi, langkah selanjutnya adalah memilih satu masalah untuk dijadikan sebagai kajian kelas. Dalam penentuan masalah apa yang akan dijadikan sebagai kajian kelas hendaknya ditempuh cara-cara yang demokratis. Kalau tidak bisa diambil secara musyawarah mufakat, maka cara pemungutan suara atau *voting* dapat dilakukan. Masalah yang dipilih dengan suara terbanyak yang dijadikan sebagai kajian kelas. Perlu diperhatikan, sekali lagi, bahwa masalah tersebut menyangkut hajat hidup orang banyak dan mendesak untuk ditangani atau dipecahkan dengan kebijakan publik yang dianggap paling tepat.

Agar pelaksanaan pemilihan masalah untuk kajian kelas ini berjalan lancar, beberapa langkah berikut dapat ditempuh guru. Pertama, membuat daftar masalah. Kelompok-kelompok kecil yang telah ditugasi untuk mengidentifikasi masalah yang ada di dalam

masyarakat atau sekolah menugasi wakilnya untuk menuliskan masalah dalam daftar masalah di papan tulis. Dengan cara yang sama, kelompok-kelompok lain mendapat giliran berikutnya sampai semua masalah yang berhasil diidentifikasi oleh semua kelompok terdaftar dalam daftar masalah. Jadi, bila dalam kelas itu terdapat 8 kelompok kecil, maka akan terdaftar delapan masalah. Kedua, melakukan musyawarah untuk mufakat, memilih satu masalah untuk ditetapkan sebagai kajian kelas. Biasanya cara ini susah ditempuh karena masing-masing kelompok cenderung untuk mengusahakan masalahnya yang dijadikan sebagai kajian kelas. Bila ini terjadi, maka cara pemungutan suara atau *voting* berdasarkan suara terbanyak dapat ditempuh.

Setelah menentukan masalah yang akan menjadi kajian kelas, siswa harus bisa mendapatkan sumber-sumber yang dapat memberikan informasi berkaitan dengan masalah yang dikaji. Dalam mencari sumber informasi tersebut, siswa akan menemukan sumber informasi yang mungkin lebih baik dari yang lainnya. Oleh karena itu, sebelumnya siswa perlu untuk mengidentifikasi sumber-sumber informasi mana saja yang akan memberikan informasi lebih banyak dan sumber-sumber mana yang kurang. Disamping itu, perlu diidentifikasi tingkat keterjangkauan sumber-sumber informasi dan persyaratan yang diminta agar diperoleh informasi yang memadai.

Beberapa sumber informasi diantaranya adalah (1) perpustakaan; (2) kantor penerbit surat kabar; (3) pakar di perguruan tinggi; (4) ahli hukum dan hakim; (5) organisasi masyarakat; (6) kantor legislatif; (7) kantor pemerintah

daerah; (8) kantor kepolisian; dan (9) jaringan informasi elektronik.

Untuk memasuki tahap pengembangan portofolio kelas, penelusuran informasi tentang masalah yang menjadi kajian kelas seharusnya sudah cukup memadai. Dalam tahap ini, kelas dibagi menjadi empat kelompok. Masing-masing kelompok bertanggung jawab untuk mengembangkan satu bagian dari portofolio kelas. Setiap kelompok hendaknya memilih bahan-bahan yang dikumpulkan oleh tim peneliti, terutama bahan-bahan yang sangat diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan yang menjadi kajian kelas. Secara rinci, tugas masing-masing kelompok adalah sebagai berikut: **Pertama**, kelompok portofolio satu: menjelaskan masalah. Kelompok ini bertanggung jawab untuk menjelaskan masalah yang dipilih sebagai kajian kelas. Kelompok ini juga harus menjelaskan beberapa hal yang menjadi alasan mengapa kelas memilihnya menjadi kajian kelas dan mengapa badan atau lembaga pemerintah tertentu seharusnya menyelesaikan masalah itu.

Kedua, kelompok portofolio kedua: menilai alternatif-alternatif kebijakan yang disarankan untuk memecahkan masalah. Kelompok ini bertanggung jawab untuk menjelaskan kebijakan-kebijakan yang sudah ada dan menjelaskan kebijakan-kebijakan alternatif, kelebihan serta kelemahannya. Berdasarkan pertimbangan kelebihan, kelemahan, serta kelayakan alternatif-alternatif yang telah diidentifikasi, kelompok yang ketiga akan memilih satu alternatif terbaik sebagai pemecahan masalah.

Ketiga, kelompok portofolio ketiga: mengusulkan kebijakan publik untuk mengatasi masalah. Kelompok ini bertanggung jawab untuk mengembang-

kan dan menjelaskan dengan tepat atas suatu kebijakan tertentu yang sudah disepakati dan didukung oleh seluruh kelas untuk memecahkan masalah.

Keempat, kelompok portofolio keempat: membuat rencana tindakan. Kelompok ini bertanggung jawab untuk membuat rencana tindakan yang mencerminkan bagaimana warga negara dapat memengaruhi pemerintah untuk menerima atau mengimplementasikan kebijakan yang disarankan oleh kelas.

Apabila portofolio kelas sudah selesai, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan hasil pekerjaan di hadapan hadirin. Presentasi dapat juga dengan menghadirkan tiga sampai empat orang juri yang mewakili kampus dan masyarakat. Dewan juri akan menilai penyajian portofolio atas dasar kriteria yang sama seperti yang digunakan untuk membuat portofolio kelas. Melalui presentasi atau *show-case* siswa mendapatkan pengalaman yang sangat berharga, khususnya dalam hal kecakapan mengemukakan pendapat, menjawab pertanyaan, berargumentasi, serta menerima saran dan kritik dari para juri dan hadirin. Agar suasana meriah, sebelum presentasi bisa diawali dengan yel-yel atau nyanyian-nyanyian yang relevan dengan masalah yang diangkat.

Ada empat tujuan dasar dari kegiatan presentasi, yaitu sebagai berikut (CCE Indonesia, 2003:47): (a) memberikan informasi kepada para hadirin tentang pentingnya masalah yang diidentifikasi bagi masyarakat; (2) menjelaskan dan memberikan penilaian atas kebijakan alternatif kepada hadirin dengan maksud agar mereka dapat memahami keuntungan dan kerugian dari masing-masing kebijakan alternatif yang diajukan; (3) mendiskusikan dengan hadirin bahwa pilihan kebijakan yang telah dipilih adalah kebijakan

yang terbaik untuk menangani masalah tersebut. Kebijakan yang dipilih juga harus didasarkan atas argumentasi yang rasional. Selain itu, diskusi ini juga untuk menjamin bahwa kebijakan yang dimabil bersifat legal, tidak melanggar konstitusi; (4) menunjukkan bagaimana cara untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat, dewan legislatif, eksekutif, dan lembaga swasta lainnya atas kebijakan yang dipilih. Tujuan tujuan tersebut di atas mewakili tanggung jawab masing-masing kelompok atas bagian tayangan dan bagian dokumentasi. Selama presentasi, masing-masing kelompok akan bertanggung jawab terhadap pencapaian tujuan tersebut. Melalui presentasi juga akan terlihat kreativitas dan kerja keras kelompok.

C. Penutup

Berdasarkan pembahasan di muka dapat disimpulkan bahwa pengembangan *intellectual capital* dan *social capital* dapat dilakukan melalui penerapan pembelajaran portofolio PKn. Dengan melihat sejumlah kegiatan yang merupakan ciri khas pembelajaran berbasis portofolio, maka jelas terlihat adanya upaya sistematis untuk melatih keterampilan intelektual siswa, misalnya menemukan masalah, mencari informasi, memahami dan menganalisis masalah tersebut, menilai kebijakan yang ada serta merumuskan kebijakan kelas sendiri. Proses ini semua terangkum dalam bagian dokumentasi portofolio. Jadi dengan menjalani serangkaian kegiatan pembelajaran portofolio para siswa dilatih untuk mengembangkan kemampuan intelektualnya. Dengan kemampuan intelektual yang terlatih, siswa akan memiliki cukup *intellectual capital* dalam rangka ber-

partisipasi secara kritis, konstruktif, dan efektif, baik dalam kehidupan sosial kemasyarakatan maupun politik kenegaraan.

Upaya pengembangan *social capital* melalui pembelajaran portofolio nampak pada sejumlah kegiatan yang harus dijalani para siswa, khususnya yang terangkum dalam bagian presentasi atau penyajian portofolio (*showcase*). Adanya kesadaran akan adanya saling ketergantungan antar kelompok kecil dan saling percaya bahwa masing-masing kelompok melakukan kegiaiatan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam panduan juga merupakan modal sosial. Demikian juga kemampuan para siswa untuk menyampaikan gagasan, menerima gagasan, mengatasi konflik, dan memecahkan masalah serta merumuskan kebijakan dan rencana tindakan merupakan ciri-ciri warga negara yang memiliki modal sosial atau *social capital*.

Dalam rangka pengembangan *intellectual capital* dan *social capital* melalui pembelajaran PKn, guru perlu memilih strategi cocok. Salah satu model pembelajaran itu adalah pembelajaran berbasis portofolio. Memang, penerapan model pembelajaran PKn berbasis portofolio membutuhkan ketekunan, kerja keras, waktu, dan biaya yang cukup banyak sehingga guru perlu memperhatikan kondisi sosial ekonomi siswa. Alokasi waktu untuk satu semester juga perlu dipertimbangkan. Dengan dukungan kepala sekolah dan instansi terkait kiranya akan membantu dalam upaya pengembangan *intellectual capital* dan *social capital* pada diri siswa.

Daftar Pustaka

- Budimansyah, D. 2002. *Model pembelajaran dan penilaian berbasis portofolio*. Bandung: Genesindo.
- Carpinni, D., Michael X., dan Keeter, S. 1996. *What americans know about politics and why it matters*. New Haven: Yale University Press.
- CCE Indonesia. 2003. *Kami Bangsa Indonesia, Praktik Belajar Kewarganegaraan, Buku Siswa*, Jakarta: CCE Indonesia.
- _____. 2003. *Kami Bangsa... Indonesia, Praktik Belajar Kewarganegaraan, Buku Panduan Guru*, Jakarta: CCE Indonesia.
- Cromer, Alan. 1997. *Connected knowledge*. New York: Oxford University Press.
- Depdiknas. 2004. *Pedoman Khusus Pengembangan Silabus dan Penilaian Mata Pelajaran Kewarganegaraan*. Jakarta: Depdiknas
- Dick, W. and Carey, L. 1978. *The systematic design of instruction*. Illinois: Scott, Foresman, and Company.
- Fajar, A. 2002. *Portofolio dalam pembelajaran IPS*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Fukuyama, F. 1995. *Trust: the social virtues and the creation of prosperity*. New York: The Frre Press.
- Gafur, A. 2003. "Evaluasi Implementasi Hasil Penataran Pembelajaran Portofolio Kewarganegaraan (ci-

- vic) Guru PPKn SLTP di Propinsi DIY". *Jurnal Teknologi Pembelajaran*, 0854-7599.
- Hirsch, E.D. Jr. 1996. *The schools we need and why we don't have them*. New York: Doubleday.
- Johnson, D. W. 1987 *Learning together and alone*. New Jersey: Prantice-Hall, Inc.
- Panen, P. 2001. *Konstruktivisme dalam pembelajaran*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Patrick, John J. 1999. *Concepts at the core of education for democratic citizenship* dalam Bahmuler, C., Charles, P. dan Patrick, John J., (Eds.). *Principles and Practices of Education for democratic citizenship: international perspectives and projects*. Bloomington: ERIC Clearinghouse.
- Putnam, R. D. 1993. *Making democracy work*. Princeton: Princeton University Press.
- _____. 1995. "Bowling alone: America's declining social capital", *Journal of democracy* 6 (January 1995): 65-78.
- Seligman, A. 1997. *The problem of trust*. Princeton: Princeton University Press.
- Sudjana. 2000. *Strategi pembelajaran*. Bandung: Falah Production. www.mapl.com.au/A2.htm.